

PERMEN 6 TAHUN 2025

PERUBAHAN
SKEMA SERTIFIKASI



<https://lsbuaskonas.co.id>

Melayani Proses Sertifikasi
sepenuh hati demi kepuasan pelanggan

Layanan PUAS
Mengantisipasi Permasalahan
Mencari Solusi



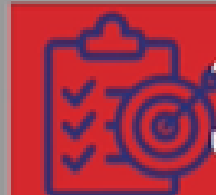
Layanannya
P U A S



"PRIMA : Pelayanan sertifikasi yang
mengedepankan edukasi dan informatif

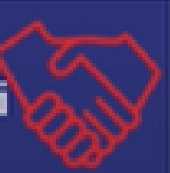
"UNGGUL : Sumber Daya Manusia (SDM)
yang mempunyai kualitas dan
integritas"





"AKUNTABEL : Lembaga sertifikasi badan
usaha yang kompeten dan transparan"

"SOLUTIF : Memberikan solusi terbaik dalam
setiap permasalahan sertifikasi yang dihadapi
oleh badan usaha"



JAKARTA, 4 JUNI 2026

Kementrian PU

- Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Beresiko
- Menambahkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan /atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum
- Menghapus acuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2024, Tentang Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Acuan hukum dari intasi terkait

- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Koorporasi.





POINT PENTING

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025

Semakin tinggi risiko proyek konstruksi, semakin ketat persyaratan teknis dan pengawasannya. Penilaian risiko mempertimbangkan:

- keselamatan konstruksi,
- dampak lingkungan,
- kesehatan,
- **tata ruang,**
- dan kepentingan umum

Proses sertifikasi melalui portal tidak lagi lewat OSS

Kegiatan Usaha : Utama
KBLI ada dicetakan NIB

No	Jenis Data Teknis/Dokumen	Isian Data Teknis/Unggah Dokumen
1	Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)	Belum memiliki UMKU SBU? Klik di sini
2	Persyaratan Izin Lainnya *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah	Pilih dokumen PDF (Max. 5 MB) Pilih Dokumen



POINT PENTING

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025

Penetapan Kualifikasi :

- Penjualan Tahunan (dinilai Per - Badan Usaha)
- Kemampuan Keuangan (dinilai Per - Badan Usaha)

Penetapan Subklasifikasi :

- Tenaga Kerja Konstruksi (PJBU, PJTBU dan PJKBU)
- Peralatan (Wajib hanya kualifikasi B dan M)

Khusus Kualifikasi kecil :

- SMAP: BU Kecil dapat menggunakan pelatihan/bimtek anti korupsi dibuktikan dengan sertifikat edukasi anti korupsi.
<https://newlearning.kpk.go.id/course/>

Pemenuhan kemampuan peralatan dapat dipenuhi melalui surat pernyataan komitmen sampai pelaksanaan pekerjaan

ISO 37001 terbitan LPK terakreditasi KAN

Kualifikasi Kecil terbagi

k 1 K 2 dan K 3

Jenis Usaha Spesialis ada Kualifikasi

Penting : Badan Usaha harus input simpan walaupun kualifikasi kecil



POINT PENTING

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2024

Peran Asosiasi:

Bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan badan usahamelaluiPengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB).

Mempertimbangkan :

- Jumlah Anggota
- Anggaran
- Fasilitas
- Instruktur



Dapat Bekerjasama dengan :

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Kabupaten/Kota
- Perguruan Tinggi
- Lembaga Penelitian
- Lembaga Pelatihan
- Asosiasi Profesi
- Asosiasi badan usaha lain

Dilaksanakan:

- Kepada seluruh BUJK kualifikasi kecil
- Berdasarkan hasil pemetaan nilai kinerja penyedia jasa tahunan terhadap BUJK kualifikasi menengah, besar, dan spesialis.

Penting : Badan Usaha harus input simpan walaupun kualifikasi kecil



POINT PENTING

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi

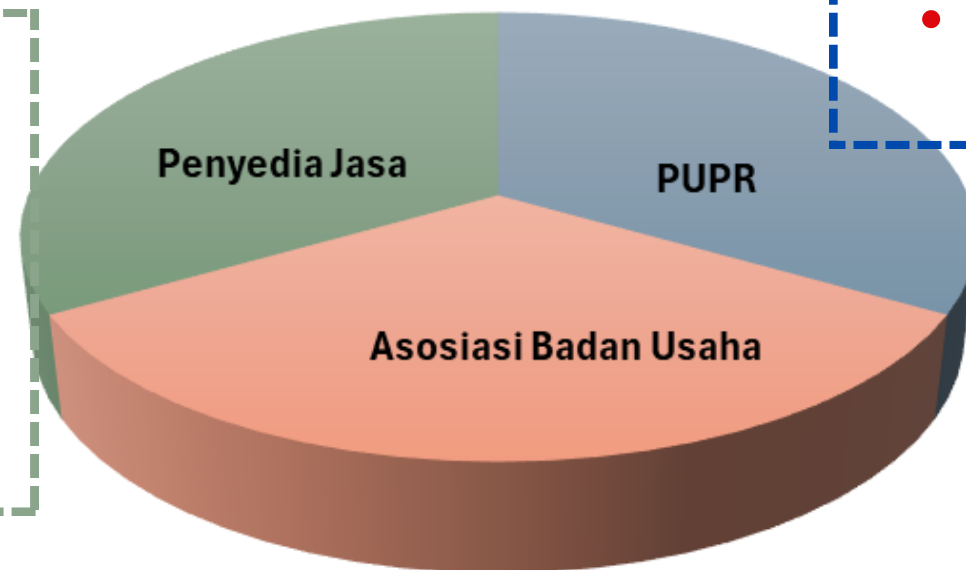
Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2024

adanya jaminan atas :

- tersedianya kriteria pengukuran terhadap performance

Motifasi :

Adanya tolok ukur yang jelas untuk melakukan perbaikan performance profil pada tingkat pelaksanaan pekerjaan dan manajemen



adanya ketidakpastian terkait :

- Pengakuan Performance Penyedia Jasa
- Pemeringkatan oleh menteri
- Referensi Pengalaman usaha untuk mempertimbangkan penetapan penyedia jasa
- Pelaksanaan pemberdayaan oleh asosiasi badan usaha

Evaluasi

Tersedianya *performance profile* sebagai bahan evaluasi dalam rangka pembinaan kepada ABU yang melakukan PUB

adanya jaminan atas :

- pelaksanaan tanggungjawab terhadap anggota asosiasi
- pewujudan tata kelola usaha yang baik
- pelaksanaan tanggung jawab profesional usaha terhadap masyarakat

Identifikasi :

Tersedianya *performance profile* sebagai bahan penyusunan daftar prioritas kegiatan pemberdayaan anggota



POINT PENTING

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025

Surat dari BKPM Nomor : B-69.S/PI.08/A.1/2026

Penyampaian surat edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

diyakini tetap berlaku.

- 2) Pelaku usaha yang telah terdaftar atau tercatat pada Sistem Ditjen AHU agar melakukan penyesuaian KBLI 2025 melalui perubahan anggaran dasar dalam hal terdapat aksi korporasi yang mengubah Maksud dan Tujuan dan perubahan kegiatan usaha atas kegiatan usaha eksisting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar.
- 4) Penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem OSS dan Sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Hukum paling lambat pada tanggal 18 Juni 2026.
- 5) Sistem Ditjen AHU memproses pengesahan pelaku usaha menggunakan KBLI 2020 sampai dengan diimplementasikannya penyesuaian KBLI 2025 sebagaimana dimaksud pada angka (4).
- 6) Sistem OSS memproses PBBR menggunakan KBLI 2020 sampai



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-69.S/PI.08/A.1/2026 Jakarta, 27 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Yth.

1. Menteri/Kepala Lembaga
2. Gubernur Seluruh Indonesia
3. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
6. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
7. Notaris
8. Pelaku Usaha

di

Tempat

Point 3

Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa melakukan perubahan anggaran dasar

Penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan Sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM dan kementerian Hukum paling lambat 18 Juni 2026



POINT PENTING

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025

Konversi KBLI dan Subklasifikasi								
No	Pengaturan Yang Tertanam Saat Ini				Pengaturan Berdasarkan Tabel Konversi			
	KBLI 2020	Judul	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	KBLI 2025	Judul	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi
1	41011	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	BG001	Konstruksi Gedung Hunian	41011	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG HUNIAN	BG001	Konstruksi Gedung Hunian
			GT001	Konstruksi Gedung Hunian			GT001	Konstruksi Gedung Hunian
2	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PERKANTORAN	BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran
			GT002	Konstruksi Gedung Perkantoran			GT002	Konstruksi Gedung Perkantoran
3	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	BG003	Konstruksi Gedung Industri	41013	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG INDUSTRI	BG003	Konstruksi Gedung Industri
			GT003	Konstruksi Gedung Industri			GT003	Konstruksi Gedung Industri
4	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	BG004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	41014	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PERBELANJAAN	BG004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
			GT004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan			GT004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
5	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	BG005	Konstruksi Gedung Kesehatan	41015	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG KESEHATAN	BG005	Konstruksi Gedung Kesehatan
			GT005	Konstruksi Gedung Kesehatan			GT005	Konstruksi Gedung Kesehatan
6	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	BG006	Konstruksi Gedung Pendidikan	41016	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PENDIDIKAN	BG006	Konstruksi Gedung Pendidikan
			GT006	Konstruksi Gedung Pendidikan			GT006	Konstruksi Gedung Pendidikan
7	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	BG007	Konstruksi Gedung Penginapan	41017	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PENGINAPAN	BG007	Konstruksi Gedung Penginapan
			GT007	Konstruksi Gedung Penginapan			GT007	Konstruksi Gedung Penginapan
8	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	BG008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	41018	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG HIBURAN DAN OLAHRAGA	BG008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
			GT008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga			GT008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
9	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	BG009	Konstruksi Gedung Lainnya	41019	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG LAINNYA	BG009	Konstruksi Gedung Lainnya
10	41020	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG	KP001	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	41020	KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG	KP001	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
11	42101	KONSTRUKSI BANGUNAN	BS001	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	42101	KONSTRUKSI JALAN PADA	BS001	Konstruksi Bangunan Sipil

KBLI kegiatan jasa konstruksi ada 67 KBLI dengan identifikasi awal :

- 54 KBLI terdapat perubahan minor baik berupa perubahan kode, nama, maupun ruang lingkup KBLI.
- 1 KBLI pecah kode
- 7 KBLI gabung kode
- 5 KBLI terdapat kasus khusus

Pekerjaan Konstruksi

- Ada 8 KBLI yang pindah pengelompokannya contoh terjadi pada subklasifikasi BS013 Kontruksi Bangunan Sipil Minya dan Gas Bumi Kode KBLI 42915 pada KBLI 2025 berpindah ke KBLI 42991(terampir)
- Ada 6 KBLI yang dilakukan penggabungan contoh terjadi subklasifikasi KK002 Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air dan KK003 Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kode KBLI 42921 digabung menjadi satu dengan kode KBLI baru 42999 (terlampir)
- Ada 1 KBLI yang pecah kode contoh terjadi pada subklasifikasi PL002 Pengerukan dengan kode KBLI 42914 dipecah menjadi kode KBLI 4219 dan KBLI 42912 (terlampir)

Perubahan pada Judul KBLI serta ruang lingkup KBLI dan subkla



POINT PENTING

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan akurasi data Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO) korporasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dan instansi berwenang dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT). Peraturan ini mulai berlaku pada 4 Februari 2025 dan mencabut Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019

SANSKSI ADMINISTRASI PASAL 22

- Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan terhadap :
 - a. Korporasi yang tidak melaporkan Pemilik Manfaat; dan
 - b. Korporasi yang menyampaikan informasi Pemilik Manfaat yang tidak benar.
- Sanksi administratif terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. pencantuman dalam daftar hitam; dan
 - c. pemblokiran akses AHU Online. (Notifikasi AHU Online atau surat elektronik, sanksi pencantuman daftar hitam pengumuman di laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum a atau penutupam akses korporation pada ahu on line

PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

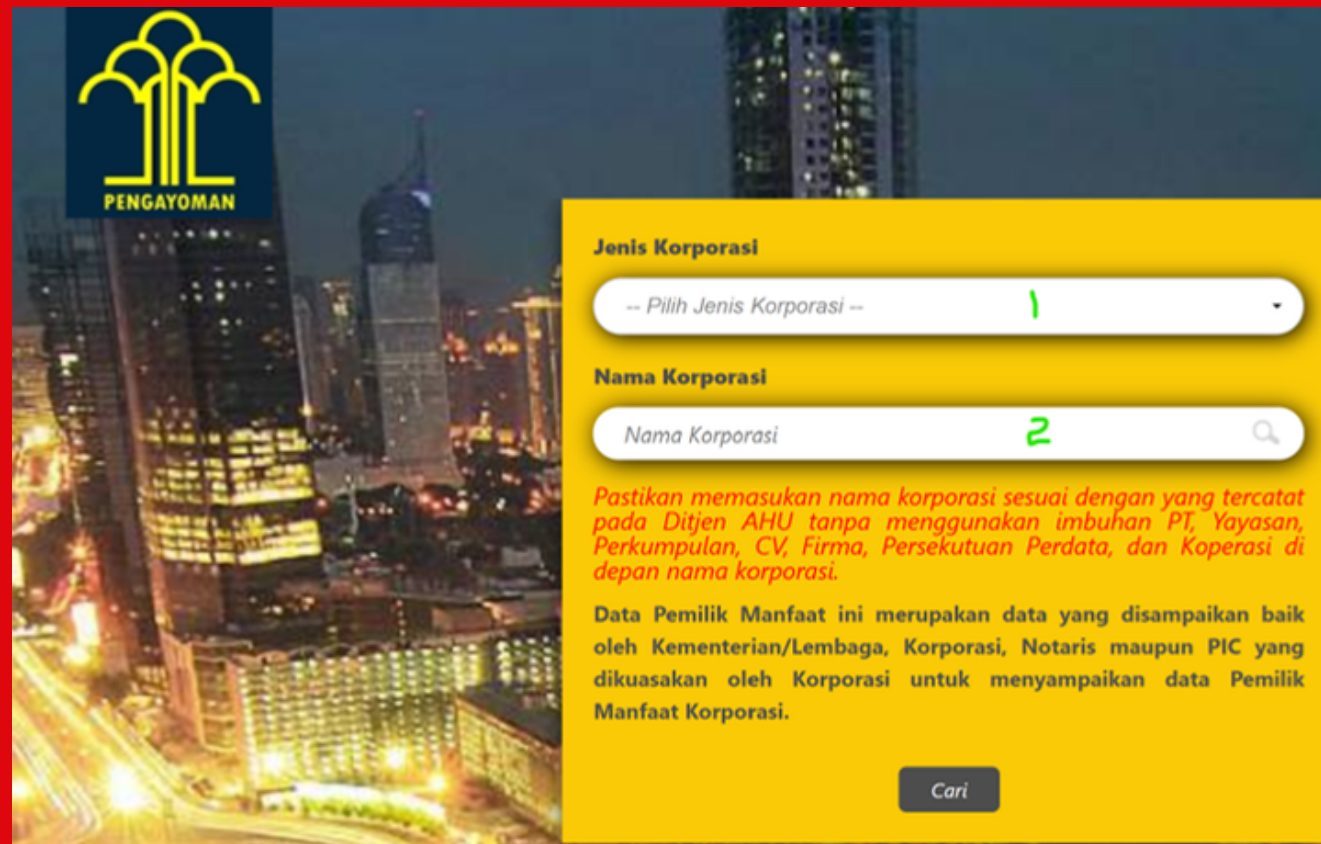
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan atas jumlah pelaporan pemilik manfaat dan mengoptimalkan akurasi data pemilik manfaat, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum maupun instansi berwenang, serta untuk mengatur dan menerapkan sanksi yang efektif bagi korporasi, perlu mengatur mengenai verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat terhadap korporasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi;

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang:

- Dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas;
- Memiliki kemampuan mengendalikan korporasi;
- Berhak menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung;
- Merupakan pemilik sebenarnya atas dana atau saham korporasi.

Praktek Pengecekan Benefit Owner

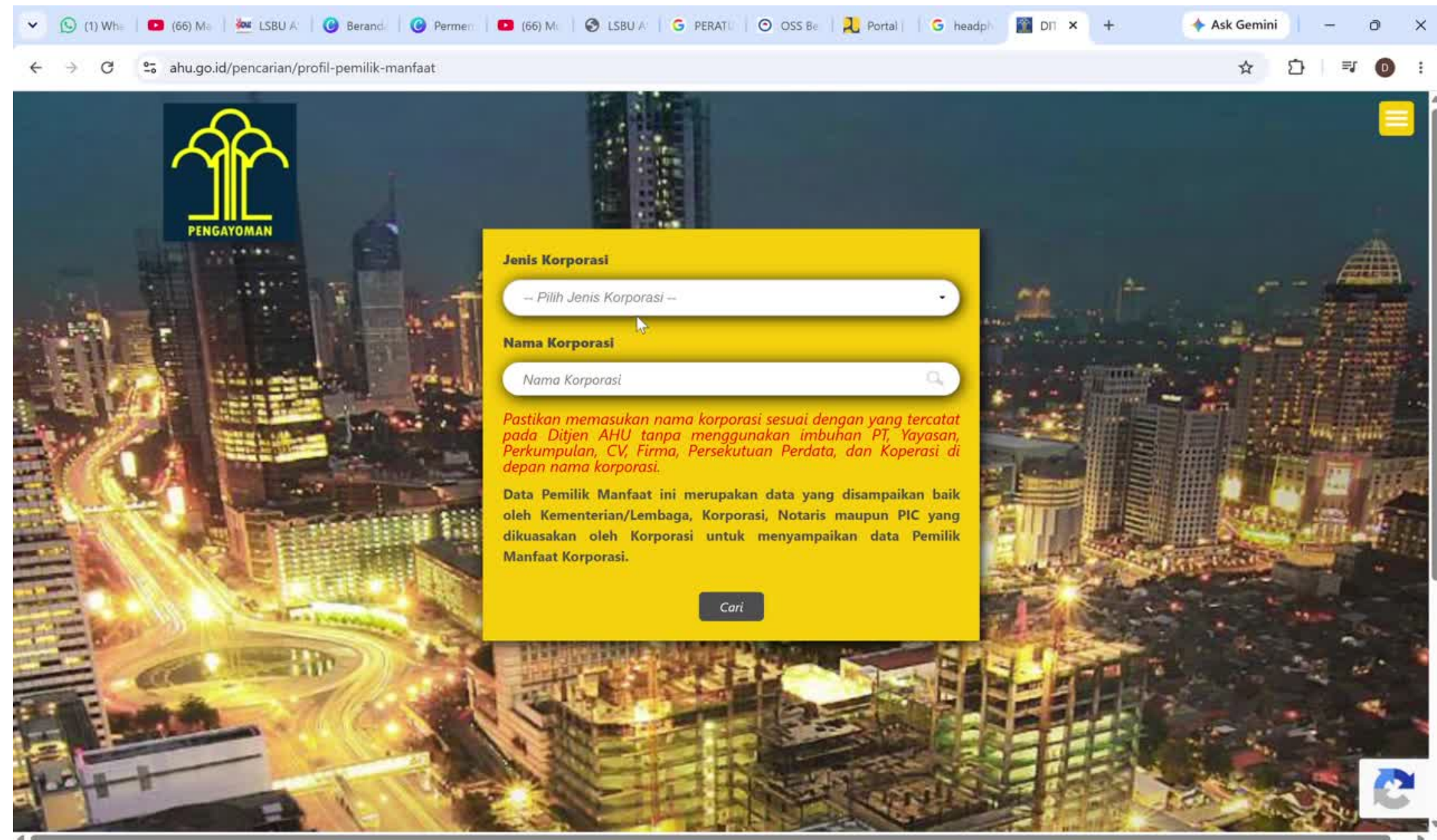
1. Masukan jenis koorporasi / Perusahaan ada menu pilihan Perseroaan, komanditer CV dll
2. Masukan nama Perusahaan bukan singkatan



The screenshot shows the AHU Online search interface. At the top left is the logo of the Department of Administrative and Legal Services (DITJEN AHU) with the word 'PENGAYOMAN' below it. The main form has a yellow background. It contains two input fields: 'Jenis Korporasi' with a dropdown menu showing '-- Pilih Jenis Korporasi --' and a green '1' next to it, and 'Nama Korporasi' with a search icon and a green '2' next to it. Below these fields is a red warning message: 'Pastikan memasukkan nama korporasi sesuai dengan yang tercatat pada Ditjen AHU tanpa menggunakan imbuhan PT, Yayasan, Perkumpulan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi di depan nama korporasi.' Below the warning is a grey 'Cari' button.

<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>

2026



The screenshot shows the AHU Online search interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL 'ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat'. The page content is identical to the previous screenshot, showing the search form with the 'Jenis Korporasi' and 'Nama Korporasi' fields, the red warning message, and the 'Cari' button. The background of the page is a night cityscape.

DITJEN AHU ONLINE _ PROFIL PERUSAHAAN -
GOOGLE CHROME 2026-06-02 11-42-55

10



POINT PENTING

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILA

Kemampuan Keuangan

merupakan kepemilikan modal usaha atau ekuitas BUJK yang tidak termasuk tanah dan bangunan

Kepemilikan modal dibuktikan dengan:

- Neraca keuangan BUJK untuk BUJK kualifikasi kecil;
- Neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar;
- **Laporan pajak tahunan terakhir untuk perpanjangan SBU.**

Modal dalam valuta asing dikonversi ke rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia **pada tanggal penerbitan neraca keuangan.**

Laporan pajak tahunan terakhir
untuk perpanjangan SBU

mandiri KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 30/04/2026 21:20:20	NTB	: 30875584F
Tanggal Buku	: 04/05/2026	NTPN	: 14J418S78
Kode Cabang Bank	: 008	STAN	: 8468

Data Setoran

Kode Billing	: 04195
NPWP	: 0 530160
Nama Wajib pajak	: PT ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL
Alamat	: JL MADRASAH NOMOR 1 NO.1, RT 001, RW 003, GANDAR

Jumlah : 00 Mata Uang : IDR

Terbilang : Puluh , Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga

Jumlah Detail : 1

Remark : -

Customer Reference Number : PPH BADAN THN 2025

Uraian : PPH BADAN THN 2025

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.
Rincian informasi atas setoran penerimaan negara ini dapat diperoleh melalui Portal MPN (mpn.kemenkeu.go.id)
This is a computer-generated message and requires no signature.
You can access the MPN Portal (mpn.kemenkeu.go.id) to obtain detailed information on state revenue payments.

sertifikan New learning KPK



The table lists the topics and the number of learning hours (JP) for the E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI). The table is signed by Yonathan Demme Tangdilintin, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, on 4 Juni 2026. A QR code is present in the bottom left corner.

Daftar Materi dan Jumlah Jam Pelajaran (JP) E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)		
No.	MATERI	JAM PELAJARAN
1	Modul 1 : Mengapa Korupsi Harus Diberantas	3 JP
2	Modul 2 : Pahami Dulu Baru Lawan	2 JP
3	Modul 3 : Pilih Strategi Berantas Korupsi	1 JP
4	Modul 4 : Aksi Integritas untuk Berantas Korupsi	2 JP
Total		8 JP

<https://newlearning.kpk.go.id/>

TUTORIAL DAPAT DIAKSES DI APLIKASI SIASKONAS

Benci korupsi ?

stop caci maki

jadikan diri bagian solusi

Indonesia bersih tugas kita bersama



 <https://lsbuaskonas.co.id/>

 sekretariat.lsbuaskonas@gmail.com

 081311946708

Jakarta 4 Juni 2026

Terima Kasih



PT. ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (PT. ASKONAS)